

Peranan Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang (Studi kasus : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bandung Smart City)

Tiara Marcella Ruskito^{1*}, Viona Eka Putri Mardiono², Tries Ellia Sandari³
¹⁻³Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Email : ¹1222100043@surel.untag-sby.ac.id, ²1222100045@surel.untag-sby.ac.id,
³triesellia@untag-sby.ac.id

Alamat : : Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur

Korespondensi penulis : 1222100043@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *This research aims to examine the role of forensic accounting in detecting and exposing acts of graft and abuse of authority, focusing on the case of the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) and the Bandung Smart City project. Forensic accounting offers an in-depth law-based investigative approach, which enables the disclosure of patterns of financial manipulation as well as weaknesses in internal controls. This research uses a qualitative method through a literature review of relevant journals, books, and literature. The results show that forensic accounting is not only effective in uncovering financial irregularities, but also contributes to increasing transparency and accountability in the public sector. Forensic accounting has proven to be a strategic tool both in the investigation process and fraud prevention, so that it can support better state financial governance.*

Keywords: *Forensic, Accounting, Gratification, Abuse, of Authority.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mengungkap tindakan gratifikasi serta penyalahgunaan wewenang, dengan fokus pada kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan proyek Bandung Smart City. Akuntansi forensik menawarkan pendekatan investigatif berbasis hukum yang mendalam, yang memungkinkan pengungkapan pola-pola manipulasi keuangan serta kelemahan dalam pengawasan internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan pustaka terhadap jurnal, buku, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak hanya efektif dalam mengungkap penyimpangan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Akuntansi forensik terbukti mampu menjadi alat strategis baik dalam proses investigasi maupun pencegahan fraud, sehingga dapat mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

Kata kunci: Akuntansi, Forensik, Gratifikasi, Penyalahgunaan, Wewenang., Fraud

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Maraknya kasus penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal serta transparansi di lembaga publik. Dua kasus besar, yaitu penyimpangan prosedur kredit di LPEI dan gratifikasi dalam proyek Bandung Smart City, menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Pada kasus LPEI, kerugian negara mencapai Rp2,5 triliun akibat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Sementara itu, kasus Bandung Smart City menunjukkan bahwa gratifikasi sebesar Rp1 miliar diterima oleh sejumlah pejabat daerah terkait pengalokasian anggaran proyek. Fenomena ini menggarisbawahi

perlunya pendekatan akuntansi forensik untuk mendeteksi pola fraud dan memperbaiki kelemahan sistem pengawasan. Akuntansi forensik, sebagai disiplin yang menggabungkan akuntansi, hukum, dan audit, memungkinkan investigasi yang sistematis terhadap laporan keuangan untuk mengungkap penyimpangan tersembunyi. Melalui teknik investigatif berbasis risiko, akuntansi forensik mampu mengidentifikasi indikasi fraud, seperti manipulasi anggaran, penggelembungan biaya (mark-up), dan penerimaan gratifikasi. Dalam konteks ini, penerapan akuntansi forensik menjadi krusial tidak hanya untuk mendeteksi, tetapi juga untuk mencegah potensi fraud di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi forensik memiliki peran sentral dalam pengungkapan tindakan korupsi yang kompleks. Dalam konteks gratifikasi, misalnya, UU No. 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap pemberian terkait jabatan harus dilaporkan, dan kegagalan melakukannya dapat berujung pada tindak pidana. Gratifikasi sering kali berbentuk pemberian uang, barang, atau fasilitas yang diterima pejabat publik untuk memengaruhi keputusan mereka. Penyalahgunaan wewenang, di sisi lain, mencakup tindakan melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Akuntansi forensik, melalui teknik seperti audit berbasis risiko dan investigasi transaksi mencurigakan, mampu mengidentifikasi pola-pola fraud yang tersembunyi dalam laporan keuangan. Teknik ini didukung oleh penggunaan analisis data keuangan yang mendalam, pengumpulan bukti yang sah, serta pemahaman tentang sistem hukum yang relevan. Dengan demikian, akuntansi forensik menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses hukum, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis eksploratif untuk mendalami fenomena gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang dalam dua studi kasus, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan proyek Bandung Smart City. Metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pola-pola fraud serta peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka terhadap jurnal, buku, laporan, dan sumber hukum yang relevan. Sepuluh jurnal nasional dan internasional dijadikan landasan teoritis, yang mencakup aspek teknis akuntansi forensik, kasus fraud, dan tinjauan hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dari hasil penelitian sebelumnya dan mengaitkannya dengan konteks kasus yang diteliti. Studi kasus pada LPEI berfokus pada penyimpangan dalam prosedur kredit dan penerimaan gratifikasi, sementara pada Bandung Smart City menyoroti manipulasi anggaran dan penyalahgunaan dana proyek.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Forensik dalam Mendeteksi Gratifikasi di LPEI

Akuntansi forensik memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi gratifikasi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Teknik audit investigatif berbasis risiko digunakan untuk menelusuri aliran dana yang tidak wajar dan mengidentifikasi hubungan transaksional antara pejabat dan pihak ketiga. Penelitian ini mengungkap bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan LPEI sering kali tidak memenuhi prosedur baku, dan beberapa keputusan disinyalir didasarkan pada pemberian gratifikasi. Hasil investigasi menunjukkan adanya pola penerimaan dana oleh pejabat melalui rekening pribadi yang terkait dengan persetujuan kredit. Gratifikasi ini biasanya diberikan dalam bentuk uang, hadiah, atau fasilitas mewah. Dalam konteks LPEI, penggunaan akuntansi forensik telah membantu mengidentifikasi sumber gratifikasi dengan menganalisis jejak transaksi keuangan, wawancara dengan pihak terkait, serta pemeriksaan bukti dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa teknik ini tidak hanya mendeteksi fraud, tetapi juga memperkuat sistem akuntabilitas di lembaga keuangan.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Proyek Bandung Smart City

Proyek Bandung Smart City menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pejabat pemerintah memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui manipulasi anggaran proyek. Teknik akuntansi forensik yang diterapkan dalam kasus ini meliputi analisis data transaksi, evaluasi laporan anggaran, dan pemantauan terhadap proses tender. Audit berbasis risiko menunjukkan adanya indikasi kolusi antara anggota DPRD dan eksekutif daerah. Contohnya, ditemukan bukti bahwa pejabat menerima gratifikasi senilai Rp1 miliar dalam bentuk uang dan fasilitas perjalanan sebagai imbalan atas persetujuan anggaran. Akuntansi forensik juga membantu dalam mengidentifikasi pola pengalihan anggaran yang melanggar aturan, seperti perubahan pos anggaran tanpa justifikasi yang memadai. Dengan pendekatan

investigatif yang sistematis, penyimpangan ini dapat diungkap dan menjadi dasar untuk proses litigasi di tingkat hukum.

Efektivitas Akuntansi Forensik dalam Pencegahan dan Deteksi Fraud

Akuntansi forensik telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya fraud, baik di sektor publik maupun lembaga keuangan. Pendekatan ini menggabungkan analisis mendalam terhadap data keuangan, investigasi transaksi mencurigakan, dan pemahaman mendalam tentang hukum untuk mengungkap berbagai bentuk penyimpangan. Dalam konteks penelitian ini, akuntansi forensik menunjukkan keunggulan dalam mendeteksi pola penyimpangan sejak dini dan memberikan landasan yang kuat untuk memperbaiki sistem pengawasan internal. Salah satu efektivitas utama akuntansi forensik adalah kemampuannya untuk mendeteksi fraud di tahap awal. Teknik audit berbasis risiko memungkinkan auditor mengidentifikasi area yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kecurangan, seperti transaksi keuangan yang tidak biasa, manipulasi anggaran, atau pemberian fasilitas yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, penerapan perangkat lunak forensik modern memberikan kemampuan untuk melacak jejak digital dari aktivitas keuangan yang kompleks. Dengan teknologi ini, auditor dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola atau anomali yang dapat menjadi indikasi awal terjadinya fraud.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penelitian menyoroti pentingnya akuntansi forensik dalam mendeteksi dan mengungkap tindakan korupsi, terutama yang berkaitan dengan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang di sektor publik. Melalui studi kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan proyek Bandung Smart City, terbukti bahwa akuntansi forensik mampu mengidentifikasi pola-pola fraud yang tersembunyi dalam laporan keuangan, seperti manipulasi data, penggelembungan anggaran, dan penyimpangan prosedur kredit. Teknik audit berbasis risiko dan investigasi transaksi mencurigakan memberikan pendekatan sistematis dalam mendeteksi penyimpangan keuangan. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan internal ditemukan sebagai salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai pendekatan preventif untuk meminimalkan risiko fraud di masa depan. Dengan kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan dana publik, akuntansi forensik menjadi komponen strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran dari peneliti yaitu Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan memanfaatkan teknologi dan audit berbasis risiko untuk mendeteksi potensi fraud sejak dini. Kedua, auditor forensik harus mendapatkan pelatihan intensif yang melibatkan penguasaan teknik investigasi keuangan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum. Ketiga, penerapan akuntansi forensik sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pendeteksian kecurangan, tetapi juga sebagai alat pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang lebih baik. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik harus terus ditingkatkan melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan risiko korupsi dapat diminimalkan, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Albrecht, C., Albrecht, W., & Dunn, J. (2004). *Fraud examination and prevention*. South-Western: Thomson Learning.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi forensik dan fenomena korupsi politik. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 47-62.
- Bhasin, M. (2015). An empirical investigation of the relevant skills of forensic accountants: Experience of a developing economy. SSRN, 2676519.
- Binekasri, R. (2022, December 6). Kronologi korupsi LPEI, berjamaah & rugikan negara Rp 2,6 T. CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221206072836-17-394046/kronologi-korupsi-lpei-berjamaah-rugikan-negara-rp-26-t>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Modul materi tindak pidana korupsi. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>
- Naibaho, R. (2024, September 26). KPK sebut 4 tersangka kasus smart Bandung City terima Rp 1 M. Detiknews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7559950/kpk-sebut-4-tersangka-kasus-smart-bandung-city-terima-rp-1-m/amp>
- Olaye, C., & Olanipekun, C. (2018). Impact of forensic accounting and investigation on corporate governance in Ekiti State. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 4(1), 28-36.

- Rezaee, Z., & Riley, R. (2010). *Financial statement fraud: Prevention and detection*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sayidah, et al. (2019). *Akuntansi forensik dan audit*.
- Simanjutak, E. (2018). Examination to determine the presence or absence of abuse of authority according to government administration law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 237-262.
- Singleton, T., & Aaron, L. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wells, J. (2011). *Financial statement fraud casebook: Baking the ledgers and cooking the books*. New York: John Wiley & Sons.